

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang harus meningkatkan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan perekonomian dengan negara lain. Kebutuhan akan dana pembangunan tersebut semakin meningkat sementara penerimaan negara yang bersumber dari sektor migas tidak dapat diandalkan lagi mengingat sektor tersebut merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Penerimaan negara juga tidak dapat bersandar sepenuhnya kepada bantuan luar negeri karena sifatnya hanya sementara dan merupakan pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Dalam menghadapi hal tersebut, pemerintah berusaha untuk mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang ada.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan keuangan yang diarahkan pada peningkatan penerimaan negara. Untuk menunjang kebijakan keuangan tersebut, dilaksanakan pengembangan perangkat yaitu perpajakan. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (dalam Mardiasmo, 2013:1 Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan, pemotongan atas pajak pertambahan nilai yang pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai juga di lakukan di PT. Murni Makmur Sejahtera Yogyakarta yang merupakan perusahaan dengan bisnis Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) yang memiliki peran sebagai pengisian gas elpiji dan menyalurkan ke distributor serta menggerakkan kegiatan perekonomian di masyarakat. Pelaksanaan pemungutan PPN yang ada pada PT. Murni Makmur Sejahtera salah satunya adalah Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Filling Fee pada gas LPG 3 kg.

Berdasarkan pertimbangan akan pentingnya pembayaran pajak pertambahan nilai maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA *FILLING FEE* PADA SPPBE PT. MURNI MAKMUR SEJAHTERA YOGYAKARTA”**. Judul tersebut perlu dibahas agar dapat memperhitungkan pajak pertambahan nilai serta untuk memahami lebih mendalam mengenai prosedur pemotongan khususnya di PT.Murni Makmur Sejahtera.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Tinjauan umum mengenai PPN.
- b. Prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pembayaran *filling fee* pada gas LPG 3 Kg pada perusahaan SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan bagi mahasiswa, Program DIII Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip dan bagi PT. Murni Makmur Sejahtera.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak di SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera
- b. Untuk mengetahui tinjauan umum mengenai PPN.
- c. Untuk mengetahui prosedur pemotongan PPN atas jasa *filling fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara menerapkan ilmu-ilmu teoritis pada keadaan yang sesungguhnya di lapangan sebagai bekal di masa depan.
2. Belajar mengenal praktik prosedur pemotongan PPN atas jasa *filling fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera.

b. Bagi Program DIII Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP

1. Menyempurnakan kurikulum yang diberikan dalam proses perkuliahan dengan ketentuan yang ada di kantor.
2. Menjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat dengan pihak PT. Murni Makmur Sejahtera.

c. Bagi Perusahaan PT. Murni Makmur Sejahtera

1. Menjalin hubungan kerjasama yang sehat dan teratur antara perusahaan dengan lembaga perguruan tinggi.
2. Mengikut sertakan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang ada di PT. Murni Makmur Sejahtera.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data yang Digunakan Dalam Penulisan

Penulis menggunakan dua macam data dalam penulisan tugas akhir ini, meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya. Dalam pengumpulan data primer, penghayatan penulis terhadap objek yang diteliti merupakan faktor yang sangat penting. Pengumpulan data primer tetap dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga pembantu, asalkan penulis telah menghayati permasalahan yang dihadapi atau telah bertemu dengan objek risetnya. Untuk mengumpulkan data primer dapat dipergunakan metode survey, observasi, dan eksperimen (Marzuki, 2005). Data primer yang diperoleh langsung dari PT.Murni Makmur Sejahtera berupa gambaran umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil dari pihak lain, seperti laporan keuangan, laporan hasil studi, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, buku perkuliahan, publikasi ilmiah dan sebagainya. Contoh data sekunder yang diambil dari PT. Murni Makmur Sejahtera adalah tinjauan teori prosedur pemotongan PPN dan arsip mengenai pemotongan PPN atas jasa *filling fee* pada tabung gas 3 kg.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah :

a. Metode Observasi

Observasi sering disebut dengan metode pengamatan. Dengan kata lain, metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno dan Arsyad, 2003). Proses pengumpulan datanya dengan mengamati kegiatan pembukuan yang berhubungan dengan prosedur pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *Filling fee* LPG 3 kg pada SPPBE PT.Murni Makmur Sejahtera.

Dalam hal ini metode observasi yang dilakukan adalah dengan cara magang/kuliah kerja praktek di SPPBE PT.Murni Makmur Sejahtera selama tiga bulan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ke seorang informan atau otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) (Gorys Keraf, 2001).

Metode wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mewawancarai secara langsung manager PT.Murni Makmur Sejahtera yaitu Bapak Alif Ardiansyah, S. Psi.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil literatur yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan para ahli dimana sebagai penuntun untuk menuju pada suatu sasaran (Gorys Keraf, 2001).

Data diperoleh dari literatur yang dimiliki instansi tentang gambaran umum PT. Murni Makmur Sejahtera dan juga buku-buku yang menunjang penyusunan tugas akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan pembahasan bab per bab, meliputi :

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

b. Bab II Gambaran Umum

Bab ini membahas tentang gambaran umum Sejarah PT.Murni Makmur Sejahtera, lokasi, visi dan misi, tujuan, tata nilai, komitmen perusahaan, fungsi dan struktur organisasi.

c. Bab III Pembahasan

Bab ini menguraikan pengertian umum Pajak, dasar hukum pajak, jenis pajak negara, pengertian PPN, dasar hukum PPN, subjek PPN, objek PPN, dasar pengenaan pajak PPN, tarif PPN, pengertian SPPBE , pengertian elpiji, jenis-jenis elpiji, serta Prosedur Pemotongan atas jasa *Filling fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera.

d. Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang telah ditulis dalam hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek tentang Prosedur Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Filling fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera.